



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2017

PT. BPR NGUNUT ARTA

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT. BPR Ngunut Arta telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Ngunut Arta posisi 31-12-2017 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.13.162.419, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.5.332.869. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Ngunut Arta selanjutnya.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

2 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR
- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
- Melindungi kepentingan stakeholders

3 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR NGUNUT ARTA

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. BPR Ngunut Arta sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

1 Transparancy (Keterbukaan)

- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas



pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.

- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)

2 Accountability

- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR
- BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR
- BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system

3 Responsibility

- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 Independency

- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)
- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

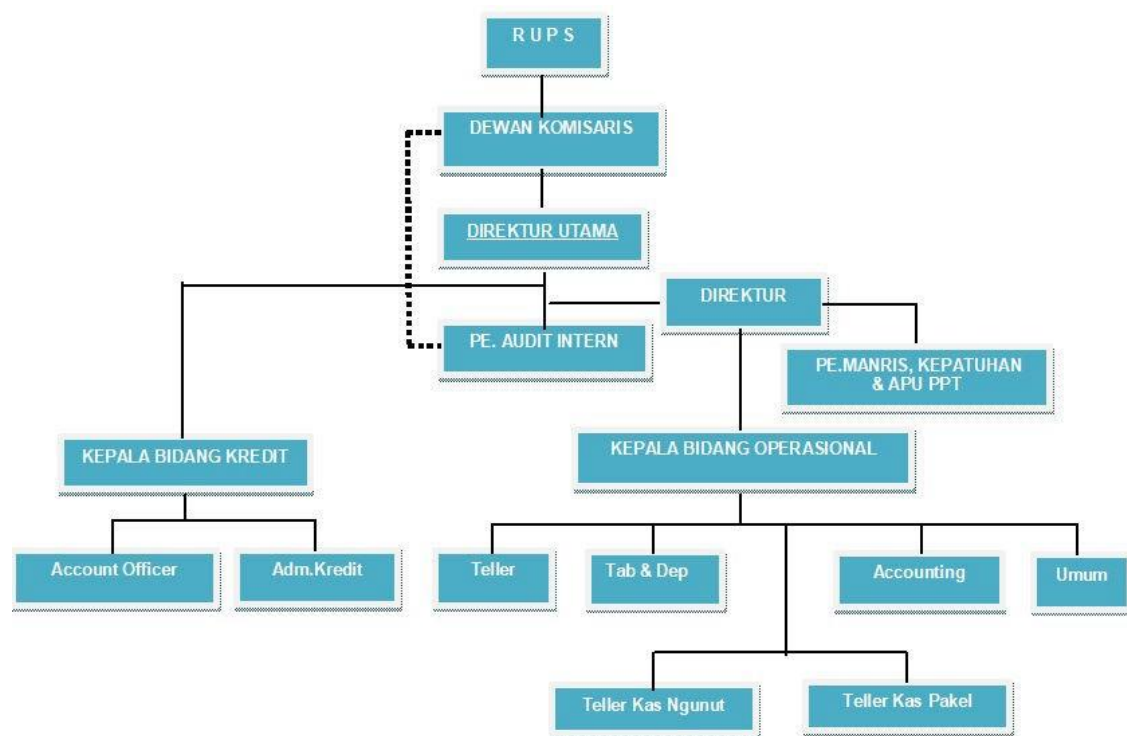
Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

5 Fairness

- BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban
- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BPR NGUNUT ARTA



III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Ngunut Arta per 31-12-2017 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 88 tanggal 08 Nopember 2017 pada Notaris Sri Areni, SH MM adalah sebagai berikut :

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Nama | : Aning Suningkat, SE |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Tulungagung/25-11-1964 |
| Pendidikan Terakhir | : Sarjana |
| Lama Jabatan | : 20 tahun |



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090



Sertifikasi Direksi : 651001210632002016
Masalaku : 21-12-2021
Pengalaman Kerja : Direktur Utama PT. BPR Ngunut Arta
Terakhir



Nama : Dra. Kustiani
Jabatan : Direktur
Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung/15-2-1967
Pendidikan Terakhir : Sarjana
Lama Jabatan : 2 tahun
Sertifikasi Direksi : 65100121061582013
Masalaku : 13-2-2018
Pengalaman Kerja : Direktur PT. BPR Ngunut Arta
Terakhir

Keterangan:

Jumlah anggota Direksi berjumlah 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan surat persetujuan OJK No.SR-8/KO.0402/017 tanggal 04-10-2017

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:



- a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
- b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
4. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem
5. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat

4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PT. BPR Ngunut Arta dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA DIREKSI | PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI |
|----|---------------------|--------------------------------------|
| | | PT. BPR Ngunut Arta |
| 1 | Aning Suningkat, SE | 0%% |
| 2 | Dra. Kustiani | 0%% |

**PT. BPR NGUNUT ARTA****Jalan Pahlawan No.8**

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

| NO | NAMA DIREKSI | HUBUNGAN KEUANGAN | | |
|----|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | ANGGOTA DIREKSI LAIN | DEWAN KOMISARIS | PEMEGANG SAHAM BPR |
| 1 | Aning Suningkat, SE | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |
| 2 | Dra. Kustiani | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |

2. HUBUNGAN KELUARGA

| NO | NAMA DIREKSI | HUBUNGAN KELUARGA | | |
|----|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | ANGGOTA DIREKSI LAIN | DEWAN KOMISARIS | PEMEGANG SAHAM BPR |
| 1 | Aning Suningkat, SE | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |
| 2 | Dra. Kustiani | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |

IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS**

Susunan Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Ngunut Arta per 31-12-2017 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 88 tanggal 08 Nopember 2017 pada Notaris Sri Areni, SH, MM adalah sebagai berikut :



Nama : Hady Bandoni Nitiutomo
Jabatan : Komisaris Utama
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/24-3-1954
Pendidikan Terakhir : Diploma Tiga
Lama Jabatan : 20 tahun
Sertifikasi Komisaris : 651001210601392016
Masalaku : 2-3-2021
Pengalaman Kerja Terakhir : Komisaris Utama PT. BPR Ngunut Arta

Nama : Ahmad Tri Wahyudi
Jabatan : Komisaris
Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung/14-4-1966
Pendidikan Terakhir : Sarjana
Lama Jabatan : 1 tahun



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090



Sertifikasi Komisaris : 651001210619552016
Masalaku : 8-11-2021
Pengalaman Kerja : Komisaris PT. BPR Ngunut Arta dan
Terakhir : Komisaris PT. BPR Cahaya Bumi Artha

Keterangan:

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan



kelangsungan usaha BPR;

3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
4. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem
5. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat

4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Ngunut Arta dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut:

| NO | NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS | PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS |
|----|------------------------------|--|
| | | PT. BPR Ngunut Arta |
| 1 | Hady Bando Nitiutomo | 15%% |
| 2 | Ahmad Tri Wahyudi | 0%% |

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

| NO | NAMA DEWAN KOMISARIS | HUBUNGAN KEUANGAN | | |
|----|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | ANGGOTA DEKOM LAIN | DIREKSI | PEMEGANG SAHAM BPR |
| 1 | Hady Bando Nitiutomo | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |
| 2 | Ahmad Tri Wahyudi | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |

2. HUBUNGAN KELUARGA

| NO | NAMA DEWAN KOMISARIS | HUBUNGAN KELUARGA | | |
|----|----------------------|-------------------|---------|----------------|
| | | ANGGOTA DEKOM | DIREKSI | PEMEGANG SAHAM |



| | | LAIN | | BPR |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | H a d y B a n d o n o Nitiutomo | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |
| 2 | Ahmad Tri Wahyudi | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |

V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

-

VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Ngunut Arta yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS tanggal 8 Nopember 2017 adalah sebagai berikut :

1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

| NO | PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN | JUMLAH ORANG | JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (dalam ribuan rupiah) |
|----|---|--------------|---|
| 1 | Jumlah keseluruhan gaji | 2 | 408.000 |
| 2 | Tunjangan | 2 | 107.915 |
| 3 | Tantiem | 2 | 0 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 2 | 0 |
| 5 | Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris | 2 | 0 |
| 6 | Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan | 2 | Mobil Dinas |
| | Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun | 2 | 515.915 |

2 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN

**PT. BPR NGUNUT ARTA****Jalan Pahlawan No.8**

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

KOMISARIS

| NO | PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN | JUMLAH ORANG | JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (dalam ribuan rupiah) |
|----|---|--------------|---|
| 1 | Jumlah keseluruhan gaji | 2 | 228.380 |
| 2 | Tunjangan | 2 | 12.671 |
| 3 | Tantiem | 2 | 0 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 2 | 0 |
| 5 | Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris | 2 | 0 |
| 6 | Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan | 0 | 0 |
| | Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun | 2 | 241.051 |

VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2017 di PT. BPR Ngunut Arta adalah sebagai berikut :

| NO | RASIO GAJI | SKALA PERBANDINGAN | |
|----|--|--------------------|------|
| 1 | Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah | 3,36 | 1,00 |
| 2 | Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah | 1,72 | 1,00 |
| 3 | Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah | 1,56 | 1,00 |
| 4 | Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris terendah | 1,72 | 1,00 |
| 5 | Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai terendah | 4,21 | 1,00 |

VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2017 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. BPR Ngunut Arta adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA ANGGOTA DEKOM | JABATAN | JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN | JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK | JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE | PERSENTASE KEHADIRAN |
|----|--------------------|---------|--|---|---|----------------------|
|----|--------------------|---------|--|---|---|----------------------|



| | | | | | KONFERENSI | |
|---|-------------------------|-----------------|--------|---|------------|------|
| 1 | Hady Bandonu Nitiutomo | Komisaris Utama | 4 kali | 4 | 0 | 100% |
| 2 | A h m a d T r i Wahyudi | Komisaris | 4 kali | 4 | 0 | 100% |

Keterangan:

PT. BPR Ngunut Arta telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

- Triwulan I Realisasi Rencana Kerja sampai bulan Pebruari 2017 secara keseluruhan belum tercapai maksimal, tercermin dari penyaluran kredit sebesar 99,49%, Deposito 106% Tabungan 84,92% dan laba hanya 58,425 untuk itu disarankan agar melakukan rekrutmen tenaga AO melalui Job Street agar mendapatkan pelamar kerja sebanyak-banyaknya untuk disaring dan untuk AO yang berpengalaman harus berani memberikan gaji agak tinggi, direksi juga disarankan untuk segera mengajukan calon komisaris yang sudah bersertifikasi untuk menggantikan posisi Bpk. Kendy lumanto dan terkait Hasil Pemeriksaan Umum OJK Direksi agar meningkatkan tata kerja dengan baik Selain itu kondisi rekening antar bank yang besar, disarankan agar BNA meluncurkan kredit dengan suku bunga rendah dengan tetap mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan bank
- Triwulan II Tingkat Kesehatan Bank secara keseluruhan "Sehat" namun NPL Bank pada bulan Mei cukup mengkhawatirkan yaitu 4, 43% disarankan agar AO melakukan penagihan secara rutin dan yang macet sebaiknya dilakukan lelang, dan dengan adanya POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Manajemen Resiko di harapkan agar Direksi segera melakukan perubahan / perpindahan untuk mengisi Job Dis yang ada sementara untuk APU dan PPT sampai bulan Mei tidak di temukan Transaksi Keuangan yang mencurigakan
- Triwulan III Sampai bulan Agustus 2017 realisasi pencapaian terhadap Rencana Kerja cukup baik , laba tercapai 101,63% , namun peningkatan laba



harus di cermati kalau adanya pelunasan kredit yang belum JT, dan NPL masih cukup mengkhawatirkan yaitu sebesar 4,27% hal ini perlu dilakukan peningkatan penagihan pada kredit - kredit bermasalah, dan Direksi harus memikirkan kaderisasi tenaga - tenaga kerja muda yang lebih bisa mengikuti perkembangan IT, karena ke depan cepat atau lambat ke depan BPR harus mengikuti perkembangan IT

- Triwulan IV Realisasi pencapaian terhadap rencana Kerja cukup baik, di mana rata rata pencapaiannya sebesar 93,19%, dan penilaian TKS secara keseluruhan adalah "Sehat", untuk Rencana Bisnis Bank tahun 2018 KYD diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,25% ,laba di proyeksikan akan tumbuh 2,41% Asset diproyeksikan akan tumbuh 4,27%, dengan mempertimbangkan bahwa tahun 2018 adalah tahun politik kondisi ini akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian Daerah sehingga akan berpengaruh juga pada pertumbuhan kredit bank untuk itu disarankan agar pelemparan kredit lebih di utamakan pada sektor usaha produktif yaitu untuk modal kerja, sementara untuk pemenuhan Modal Inti diharapkan pada tahun 2019 sudah dapat memenuhi ketentuan POJK No. 5/POJK.03/2015 dengan komitmen dari para pemegang saham tidak membagikan deviden sampai terpenihinya modal inti 6 milyar.

IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2017 di PT. BPR Ngunut Arta dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

| INTER NAL FRAUD | JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | DIREKSI | | DEWAN KOMISARIS | | PEGAWAI TETAP | | PEGAWAI TIDAK TETAP | |
| | Tahun Sebelum- nya | Tahun Laporan | Tahun Sebelum- nya | Tahun Laporan | Tahun Sebelum- nya | Tahun Laporan | Tahun Sebelum- nya | Tahun Laporan |
| Dalam 1 (satu) tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah disele- saikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Dalam proses penye- lesaian di internal BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum diupa- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PT. BPR NGUNUT ARTA****Jalan Pahlawan No.8**

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| yakan penye-lesaian-nya | | | | | | | | |
| Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2017 yang terjadi di PT. BPR Ngunut Arta dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

| PERMASALAHAN HUKUM | JUMLAH | |
|--|---------|--------|
| | PERDATA | PIDANA |
| Telah selesai(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 | 0 |
| Dalam proses penyelesaian | 0 | 0 |

Keterangan:

Selama tahun 2017 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh PT. BPR Ngunut Arta, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.

XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PT. BPR Ngunut Arta memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2017 di PT. BPR Ngunut Arta dijelaskan pada tabel dibawah ini :

| No | Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (dalam juta rupiah) | Keterangan |
|----|---|---------|--------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Nama | Jabatan | | | |
| 1 | | | | | | 0 | |

Keterangan:

Dalam tahun 2017, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan



XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR Ngunut Arta telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR



11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Ngunut Arta sampai dengan posisi 31-12-2017 antara lain :

- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian, Kantor Cabang dan Kantor Kas
- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang
- Laporan Keuangan PT. BPR Ngunut Arta telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Ngunut Arta untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- Sesuai keputusan RUPS PT. BPR Ngunut Arta, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor PT. BPR Ngunut Arta untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Sistem pengendalian internal
- Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip prudential banking, seperti KPMM, BMPK dan NPL. Sepanjang tahun 2017, secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip prudential banking
- Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya yang mudah diakses oleh karyawan
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Ngunut Arta posisi 31-



12-2017, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Ngunut Arta adalah sebesar Rp.5.332.870, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

- Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip prudential banking, seperti KPMM, BMPK dan NPL. Sepanjang tahun 2017, secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip prudential banking
- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Sistem pengendalian internal

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2017

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit dan risiko operasional adalah 88% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu 12%
- Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha
- Rasio NPL (net) adalah 4,61%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net)

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR Ngunut Arta telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi,



operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen

3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Ngunut Arta sampai dengan posisi 31-12-2017 meliputi:

- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian dan Kantor Kas
- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- Laporan Keuangan PT. BPR Ngunut Arta telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Ngunut Arta untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- Sesuai keputusan RUPS PT. BPR Ngunut Arta, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor

**PT. BPR NGUNUT ARTA****Jalan Pahlawan No.8**

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

Akuntan Publik Made Sudarma, Thomas & Dewi sebagai Auditor PT. BPR Ngunut Arta untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017

Adapun KAP yang dipakai PT. BPR Ngunut Arta dalam 2(dua) tahun terakhir adalah :

| TAHUN | NAMA KAP | NO. PERJANJIAN KERJA | MASALAH PERJANJIAN KERJA | KAP TERDAFTAR |
|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 2017 | Made Sudarma, Thomas & Dewi | PAU.689/MTD/MLG/XI/2017 | 31-1-2018 s.d. 30-4-2018 | Terdaftar di OJK |
| 2016 | Made Sudarma, Thomas & Dewi | PAU.163/TNR-MLG/XII/2015 | 8-12-2015 s.d. 31-3-2016 | Terdaftar di OJK |

3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT. BPR Ngunut Arta telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Ngunut Arta mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit



3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian internal

XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PT. BPR Ngunut Arta dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

| NO | PENYEDIAAN DANA | JUMLAH | |
|----|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | DEBITUR (orang) | NOMINAL (ribuan rupiah) |
| 1 | Kepada Pihak Terkait | 6 | 776.679 |
| 2 | Kepada Pihak Tidak Terkait | 425 | 9.373.530 |

Keterangan:

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT. BPR Ngunut Arta

XIV RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Ngunut Arta senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT. BPR Ngunut Arta menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

RENCANA BISNIS PT. BPR NGUNUT ARTA TAHUN 2018

1. Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR



2. Meningkatkan penyaluran kredit dan fokus pada permintaan kredit yang riil dan sehat
3. Menyempurnakan proses kredit di semua segmen perkreditan

XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR NGUNUT ARTA

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Ngunut Arta telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PT. BPR Ngunut Arta telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam surat kabar "Surya Pos" yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

3 Laporan Keuangan Bulanan

PT. BPR Ngunut Arta menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR NGUNUT ARTA

1. PT. BPR Ngunut Arta telah memberikan informasi mengenai produk PT.

**PT. BPR NGUNUT ARTA****Jalan Pahlawan No.8**

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

BPR Ngunut Arta secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Ngunut Arta pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website dengan alamat Bankbna.co.id

2. Selain itu, PT. BPR Ngunut Arta menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan

XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

PT. BPR Ngunut Arta aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain :

| NO | NAMA KEGIATAN | TUJUAN PENGGUNAAN | NILAI NOMINAL (dalam ribuan rupiah) | LEMBAGA PENERIMA |
|----|--|------------------------------|---|------------------|
| 1 | Tabur Benih Ikan di Waduk Wonorejo Tulungagung | Pengenalan Jasa Perbankan | 2.500 | Perum Jasa Tirta |



XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2017

| NILAI KOMPOSIT | PERINGKAT KOMPOSIT | DEFINISI PERINGKAT |
|---|-------------------------------|--|
| 1,84 | Baik | PT. BPR Ngunut Arta telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Ngunut Arta |
| ANALISIS | | |
| <p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ngunut Arta, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap2. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap | | |



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

XVIII PENUTUP

Penerapan Tata kelola PT. BPR NGUNUT ARTA berdasarkan penilaian sendiri hasilnya adalah baik , namun kami sadar masih diperlukan perbaikan dan evaluasi secara terus menerus untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif agar penerapan Tata Kelola berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Tata Kelola yang baik sangat kami perlukan untuk menjalankan perusahaan ini agar ke depan bisa lebih baik dan maju dan berkembang secara sehat tanpa meninggalkan azaz prudential .

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ngunut Arta ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ngunut Arta. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ngunut Arta ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ngunut Arta, Terima Kasih.

Adapun untuk penilaian selanjutnya kami serahkan kepada Pengawas dari Otoritas Jasa Keuangan

Tulungagung, 28 April 2018

Pengurus PT. BPR Ngunut Arta



Aning Suningskat, SE
Direktur Utama

Hady Bandono Nitiutomo
Komisaris Utama